



Efektivitas Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SDN 34/I Teratai

Syafrida Dwi Hestiana^{*1}, Fadelina Wizola Diva², Meli Haryanti³, Yantoro⁴, Bradley Setiyadi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: syafridadwihestiana28@gmail.com, fadelinawizola@gmail.com, meliharyanti12@gmail.com, yantoro@unja.ac.id, bradleysetiyadi@unja.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01</p> <p>Keywords: <i>Education</i> <i>Decentralization;</i> <i>Teacher Professionalism.</i></p>	<p>The purpose of this research is to find out the description and implications of decentralization of education in increasing the professionalism of teachers in these schools. To answer these problems, this study uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation, as well as using data analysis techniques through data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions. The results of the research on Decentralization of Education in Improving Teacher Professionalism at SDN 34/I Teratai: (1) Decentralization of education is the granting of authority to the regions to manage their education, then the regions delegate it to each school (2) The central government continues to control education organized by the regional government and each school through national accreditation carried out by BAN-SM (3) Aspects that fall under the authority of schools in implementing decentralized education namely: (a) Planning and evaluation of school programs, (b) Aspects of managing the learning process, (c) Aspects of manpower management, (d) Aspects of financial management. Decentralization of Education in Improving Teacher Professionalism at SDN 34/I Teratai: (1) School programs to increase professionalism can be implemented well (2) Each teacher seeks to improve the management of the learning process as an implication of implementing supervision (3) Schools have teaching staff according to needs and (4) Financial management carried out by schools can motivate teachers to carry out their duties properly.</p>
<p>Artikel Info</p> <p>Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01</p> <p>Kata kunci: <i>Desentralisasi Pendidikan;</i> <i>Profesionalisme Guru.</i></p>	<p>Abstrak</p> <p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahu deskripsi dan implikasi desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di sekolah tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SDN 34/I Teratai: (1) Desentralisasi pendidikan merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola pendidikannya, lalu daerah melimpahkan kepada masing-masing sekolah (2) Pemerintah pusat tetap mengontrol pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masing-masing sekolah melalui akreditasi nasional yang dilaksanakan oleh BAN-SM (3) Aspek-aspek yang menjadi kewenangan sekolah dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan yakni: (a) Perencanaan dan evaluasi program sekolah, (b) Aspek pengelolaan proses belajar, (c) Aspek pengelolaan ketenagaan, (d) Aspek pengelolaan keuangan. Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SDN 34/I Teratai: (1) Program sekolah dalam meningkatkan profesionalisme dapat terlaksana dengan baik (2) Masing-masing guru berupaya meningkatkan pengelolaan proses belajarnya sebagai implikasi dari pelaksanaan supervisi (3) Sekolah memiliki tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan dan (4) Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh sekolah dapat memotivasi guru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.</p>

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan kembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Ada dua buah konsep pendidikan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu belajar dan

pembelajaran. Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik dan konsep pembelajaran berakar pada pihak pendidik. Dalam proses belajar mengajar (PBM) terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik. Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai

penerima pelajaran yang dibutuhkannya, sedangkan pendidik adalah seseorang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pengolah kegiatan belajar mengajar dan seperangkat pesanan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif.

Meningkatkan mutu pendidikan adalah sebuah keharusan, untuk mengungkapkannya membutuhkan adanya upaya perbaikan di semua sektor yang mendukung dunia pendidikan itu sendiri. Prasyaratnya adalah adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, diantaranya gedung pendidikan yang representatif, fasilitas perpustakaan, sistem pendidikan, anggaran yang cukup, dan guru yang profesional sebagai tenaga pendidik. Dimulai semenjak Indonesia mulai memasuki era reformasi semua lini sendi birokrasi di Indonesia juga tidak luput dari reformasi. Dari dulu yang kesemua lini bernafaskan sentralistik sedikit demi sedikit bergeser pada paradigma desentralistik. Demikian juga yang terjadi pada sistem pendidikan kita yang juga memaksa diri untuk mengikuti era desentralisasi. Pelimpahan wewenang untuk mengatur sistem sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk melihat hasil perkembangannya.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa desentralisasi pendidikan memiliki peran penting bagi peningkatan kreativitas guru, karena melalui desentralisasi pendidikan guru dapat mengembangkan lembaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Istilah desentralisasi (*decentralization*) pendidikan menurut Agrawal dan Ribot (2000:3) sebagai tindakan pemerintah pusat secara formal menyerahkan kekuasaannya dibidang pendidikan kepada aktor dan lembaga pendidikan pada level yang lebih rendah dalam suatu daerah administratif-politis serta hirarki teritorial. Proses desentralisasi menuai harapan bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Nafas partisipasi dari berbagai pihak untuk kesuksesan bersama menghipnotis dan mengamini perkembangan ini. Dari pihak penyelenggaraan diberi wewenang untuk dapat mengatur wilayah kekuasaannya. Selebihnya masyarakat diberi hak dan diberi kesempatan aktif untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Selain itu masyarakat juga berhak mengontrol dan mengawasi proses yang berlangsung.

Kabupaten Batanghari merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menjadi sasaran desentralisasi pendidikan dari Pusat. Untuk melihat sejauh mana efektifitas desentralisasi pendidikan terhadap profesionalisme guru di daerah, perlu dilaksanakan penelitian. SDN 34/I Teratai sebagai ujung tombak proses pendidikan secara desentralisasi, berupaya mengembangkan lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangannya dalam desentralisasi pendidikan, yang mencakup aspek: perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengelolaan kurikulum, pengelolaan proses belajar, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan peralatan dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, pelayanan siswa, hubungan sekolah dan masyarakat dan pengelolaan iklim sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan SDN 34/I Teratai. Oleh karena itu, penulis tertarik melaksanakan proses penelitian untuk melihat secara langsung efektivitas desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di SDN 34/I Teratai.

tralisasi pendidikan dari Pusat. Untuk melihat sejauh mana efektifitas desentralisasi pendidikan terhadap profesionalisme guru di daerah, perlu dilaksanakan penelitian. SDN 34/I Teratai sebagai ujung tombak proses pendidikan secara desentralisasi, berupaya mengembangkan lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangannya dalam desentralisasi pendidikan, yang mencakup aspek: perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengelolaan kurikulum, pengelolaan proses belajar, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan peralatan dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, pelayanan siswa, hubungan sekolah dan masyarakat dan pengelolaan iklim sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan SDN 34/I Teratai. Oleh karena itu, penulis tertarik melaksanakan proses penelitian untuk melihat secara langsung efektivitas desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di SDN 34/I Teratai.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, dapat digunakan bermacam-macam metode tergantung dari sifat dan masalah yang diteliti. Metode penelitian memiliki peran penting dalam menentukan arah kegiatan untuk memudahkan peneliti mencapai tujuan. Dengan memperhatikan tujuan penelitian yang dikaitkan dengan topik yang teliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah "suatu penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga akan mengungkapkan fakta-fakta serta tidak menggunakan dan melakukan pengujian hipotesa" (Lexi J. Moleong, 2016:20). Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan sistematis mengenai subyek yang diteliti Jenis Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara mendalam mengenai fenomena serta untuk memperoleh diskripsi yang utuh tentang upaya sekolah dalam meningkatkan minat baca siswa di SDN 34/I Teratai dalam tinjauan Pendidikan.

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah SDN 34/I Teratai Kabupaten Batanghari. Penulis memilih lokasi tersebut, karena SDN 34/I Teratai termasuk salah satu lembaga pendidikan di daerah (khususnya Batanghari) yang menjadi sasaran desentralisasi pendidikan. Adapun alasan lainnya yakni, sekolah tersebut mudah diakses oleh penulis,

sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan proses penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan jelas makna dari indikator-indikator yang ada, membandingkan dan menghubungkan antara indikator yang satu dengan indikator yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan mengacu konsep dari Hubberman dan Milles dalam Sugiyono, yaitu komponen dalam analisis data interactive.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan tentang Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi Pendidikan di SDN 34/I Teratai sudah berjalan dengan baik. Pelimpahan kekuasaan dari kepala sekolah terhadap guru terlaksana dengan baik. Masing-masing guru berupaya meningkatkan pengelolaan proses belajar mengajarnya dari pelaksanaan supervisi. Menurut (Sabandi, 2013) supervisi seharusnya dilakukan untuk menjamin pembelajaran yang berkualitas, karena terdapat hubungan langsung antara kinerja guru dengan prestasi belajar siswa. Dalam artian, semakin tinggi kinerja guru maka semakin prestasi belajar siswa. Jadi, adanya supervisi Pendidikan sangat diperlukan bagi para guru agar pekerjaan yang dilakukan oleh guru bisa berjalan sesuai dengan ketentuan.

Menurut Hurst dalam Nugroho (2014:2) pengertian desentralisasi pendidikan "the decentralization process implies the transfer of certain function from small group of policy-makers to a small group of authorities at the local level", yang artinya desentralisasi merupakan proses penyerahan fungsi-fungsi tertentu dari sekelompok kecil pembuat kebijakan kepada satu kelompok kecil pemegang kekuasaan pada tataran lokal. Definisi Hurst tersebut telah menggambarkan dengan jelas proses penyerahan fungsi-fungsi pemerintahan yang kemudian diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan menurut Chau dalam Nugroho, "desentralisasi pada konsep pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya". Menurut Rondinelli dalam Hidayat dan Machali (2015:54), terdapat empat bentuk desentralisasi sebagai berikut:

a) Dekonsentrasi adalah pembagian sebagian kewenangan atau tanggung jawab adminis-

tratif ke tingkat yang lebih rendah di bawah departemen dan juga perwakilan pusat, pengalihan beban kerja dari pejabat pusat ke kantor diluar ibukota atau pemerintahan pusat.

- b) Delegasi merupakan pelimpahan pengambilan keputusan dan juga kewenangan menejerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada dibawah pengawasan pemerintah pusat.
- c) Devolusi merupakan transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan menejemen kepada unit otonomi daerah.
- d) Privatisas adalah tindakan pemberian kewenangandari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat.

Keempat bentuk tersebut "yang menjadi model desentralisasi di Indonesia sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah bentuk yang ketiga, yaitu model devolusi" (Hidayat dan Machali (2015:55). Model ini memiliki konsekuensi tanggung jawab atas apa yang diputuskan termasuk berimplikasi pada keuangan dan manajemen dibebankan pada kabupaten dan kota. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada pelayanan dasar di daerahnya seperti di bidang pertanahan, pertanian, pendidikan, kebudayaan dan yang lainnya.

Sedangkan desentralisasi pendidikan merupakan gabungan dari dua kata yaitu antara desentralisasi dan pendidikan. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian desentralisasi pendidikan, diantaranya yaitu:

- a) Menurut Burnett e.al yang dikutip oleh M. Sirozi (2015:83), desentralisasi pendidikan adalah otonomi untuk menggunakan input pembelajaran sesuai dengan tuntunan sekolah dan komunitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan komunitas.
- b) Abdul Halim dalam M. Sufyarman mengartikan desentralisasi pendidikan yaitu terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan juga mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan.

c) Menurut Sufyarman (2016:83), desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan.

Dengan demikian, desentralisasi pendidikan dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah beserta masyarakat, pengelola dan pengguna pendidikan itu sendiri. Untuk membuat perencanaan dan mengambil sebuah keputusan sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini dilaksanakan agar setiap daerah dapat menggali dan juga mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Ada dua kata kunci yang bisa menjelaskan tujuan dari desentralisasi. Menurut Jalal dan Musthafa dalam M. Sirozi (2015:83), ada dua konsep yang berbeda, tetapi saling terkait dalam desentralisasi pendidikan. Konsep pertama berkenaan dengan isu umum desentralisasi, yaitu transfer otoritas kebijakan pendidikan dari pusat ke daerah. Dalam konsep ini, pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan pendidikan kepada pemerintah daerah beserta dana yang dibutuhkan untuk membiayai tanggung jawab yang dibebankan. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan masing-masing pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah yang memutuskan berapa banyak dan belanja pendidikan apa yang diperlukan. Konsep kedua berkenaan dengan pergeseran berbagai keputusan pendidikan dari pemerintah kemasyarakat. Ide dasar di balik konsep ini, bahwa masyarakat harus lebih tahu dan memutuskan sendiri program pendidikan yang dikehendaki karena masyarakatlah yang akan memanfaatkannya.

Dengan dua konsep tersebut maka lebih dijelaskan kembali bahwa tujuan utama desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada semacam konsensus global, khususnya dikalangan negara berkembang, bahwa melakukan desentralisasi adalah cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena mutu pendidikan ditentukan oleh banyak faktor yang saling terkait, maka desentralisasi pendidikan melibatkan pendelegasian keputusan tentang beberapa faktor. Jalal dan Musthafa yang dikutip oleh M. Sirozi (2015:235)

menjelaskan bahwa ruang lingkup desentralisasi pendidikan mencakup:

- a) Perencanaan dan evaluasi program sekolah, sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal dan evaluasi diri.
- b) Pengelolaan kurikulum, Sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat.
- c) Pengelolaan proses belajar, Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode dan tehnik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah.
- d) Pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan, sanksi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.
- e) Pengelolaan peralatan dan perlengkapan, pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan juga perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian dan kemutakhirannya terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar.
- f) Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.
- g) Pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk dapat melanjutkan sekolah atau untuk memasuki

dunia kerja hingga pengurusan alumni telah didesentralisasikan.

- h) Hubungan sekolah dan masyarakat, adalah untuk dapat meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan juga finansial yang sudah merupakan kewenangan sekolah, yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensinya.
- i) Pengelolaan iklim sekolah, Iklim sekolah yang kondusif untuk melakukan kegiatan akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif.

Dengan demikian, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah dan yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensinya. Jadi peran guru untuk menumbuhkan iklim sekolah melalui proses belajar mengajar perlu ditingkatkan. Pemberian motivasi dan apresiasi atas pemikiran siswa dapat memberikan ruang bagi siswa untuk berani mengeluarkan pendapat dan berkeaktivitas.

2. Tinjauan tentang Profesionalisme Guru

Program sekolah di SDN 34/I Teratai dalam meningkatkan profesionalisme guru dapat terlaksana dengan baik. Sekolah memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan. Namun masih ada guru yang mengajar di dua kelas untuk menggantikan sementara. Hal ini membuat guru pendidik tidak maksimal pada saat mengajar. Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh sekolah dapat memotivasi guru untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kata profesionalisme berasal dari kata profesi yang berarti "suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu" (Agung, 2014:57). Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dipersiapkan untuk pekerjaan tersebut.

Merujuk kata profesional tersebut, dapat dipahami bahwa kata profesional orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain

pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi juga harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah di dalam menentukan kebijakan-kebijakan: organisasi dan proses belajar-mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber-sumber pendanaan sekolah. Desentralisasi Pendidikan di SDN 34/I Teratai sudah berjalan dengan baik. Hubungan antara kepala sekolah dan guru baik dan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tingkat profesionalitas guru di SDN 34/I Teratai tinggi. Guru mengajar sesuai jam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dan merata di setiap kelasnya. Gurunya juga merata sesuai keutuhan sehingga tidak ada lagi permasalahan kekurangan guru.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Efektivitas Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SDN 34/I Teratai.

DAFTAR RUJUKAN

Agung, Iskandar. Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014

- Ervannudin, Nur dan Bimo Wahyu Widodo, Desentralisasi Pendidikan dan Peran aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, Universitas Negeri Surakarta
- Fatkhuri. (2019). Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan . *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 280-281.
- Hidayat, Ara dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, Bandung: Pustaka Educa, 2015
- Hutagalung, S. S. (2017). *Tata Kelola Pendidikan Pada Daerah Otonomi Baru* . Bandar Lampung : AURA.
- Jalal, F. Musthafa, B. (2:001). "Education Reform in the Context of Regional Autonomy: The Case of Indonesia". Jakarta: Ministry of National Education & National Development Planning Agency the Republic of Indonesia and The World Bank.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Nugroho. Riant. *Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Purwanto, T., Suwaryo , U., & Mulyawan , R. (2019). Desentralisasi Pendidikan . *Manajemen Pelayanan Publik* , 14-15.
- Ridwan, I. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah . *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)*, 90-91.
- Sabandi, A. (2013). Supervisi Pendidikan Untuk Pengembangan Profesionalitas Guru Berkelanjutan. *Pedagogi, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, XIII (2), 1-9. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pedagogi/article/view/4275>
- Saputra, I., Firman , & Ahmad, R. (2022). *Penerapan Desentralisasi Pendidikan pada Manajemen Berbasis Sekolah dari Pola Lama ke Pola Baru*, 67-69.
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2015.
- Sufyarman, M. *Kapita selekta Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyanto. (2001). Implementasi Desentralisasi Pendidikan Terhadap Otonomi Daerah. *Cakrawala Pendidikan* , 287-288.
- Yunus, Abu Bakar dan Syarifan Nurjan. *Profesi Keguruan*. Surabaya: Aprinta, 2015.861